

## PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KELURAHAN AIE PACAH

Nada Kamilia<sup>1</sup>, Syamsir<sup>2</sup>, Nora Eka Putri<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

<sup>2)</sup> Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

<sup>3)</sup> Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 23 Januari 2019

Direvisi: 27 Januari 2019

Diterbitkan: Februari 2019

### KATA KUNCI

Pelaksanaan, Rumah Tidak Layak Huni.

### KORESPONDEN

No. Telepon: 082386484748

E-mail:

[Nadakamilia94@gmail.com](mailto:Nadakamilia94@gmail.com),

[Syamsirsaili@yahoo.com](mailto:Syamsirsaili@yahoo.com),

[noraekaputri@fis.unp.ac.id](mailto:noraekaputri@fis.unp.ac.id)

### A B S T R A K

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai masih terkendalanya pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah. Ada 3 (tiga) tujuan dalam penelitian ini, yaitu : (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah. (2) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dari program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah. (3) untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang Kelurahan Aie Pacah. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan maupun instansi-instansi pemerintahan terkait namun dari proses pelaksanaannya masih adanya masalah yang timbul. (2) kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah diantaranya terkait dengan faktor terbatasnya dana yang diberikan dan kurangnya sumber daya yang diberikan. (3) adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengupayakan meminimalisir kendala yang ada agar keberhasilan suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.*

## PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Namun tidak semua manusia mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut. Contohnya saja kebutuhan papan, masih banyak masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Padang yang belum memiliki rumah layak huni. Dilihat dari fungsinya, rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung diri dari berbagai ancaman keamanan tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu kondisi rumah dan fasilitas tempat tinggal akan mempengaruhi derajat kesehatan penduduk.

Dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang tersentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap terhadap perkembangan kebutuhan. Hal ini merupakan urusan publik selain urusan individu. (Bappenas, 2013:455). Selaras dengan hal itu, Iwan (2004 : 163) juga mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidak mampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal. Maka peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk berfungsinya sistem perumahan yang terjangkau harus dijalankan, bahkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi. Ini adalah konsekuensi bila negara mengakui

bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar. (Santoso, 2002 : 59).

Selanjutnya, kondisi rumah tinggal menjadi salah satu indikator kemiskinan. Luas bangunan berbanding dengan jumlah penghuni rumah, kelayakan kualitas bahan bangunan rumah dan kepemilikan fasilitas MCK merupakan kriteria yang menempati urutan teratas. Dengan kata lain kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Berbagai upaya dan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang juga terus berupaya mensejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam percepatan penurunan angka kemiskinan adalah dengan meluncurkan sebuah program yang terintegrasi dan terpadu yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bantuan rumah tidak layak huni dianggap berdampak positif memutus salah satu rantai kemiskinan efeknya terasa seketika itu juga. Perkembangan Kota Padang di berbagai sektor pembangunan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat seperti munculnya berbagai perumahan-perumahan mewah yang berada di sekitar permukiman sederhana masyarakat Kota Padang dan pada akhirnya kesenjangan sosial makin terasa.

Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Padang untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui program bantuan merehab seribu rumah tidak layak huni

per tahun atau dikenal dengan program bedah rumah bagi warga miskin yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Padang. Program bedah rumah bagi warga miskin ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan tujuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin, serta memberikan dorongan kepada masyarakat yang mampu agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Pelaksanaan program yang dilakukan ini bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (Disosnaker), Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan (TRTBP) juga dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, Cooperation Social Responsibility (CSR) swasta, kemudian aparat Kecamatan, Kelurahan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Kelurahan Aie Pacah terdiri dari 10 rukun warga (RW) dan 40 rukun tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga 729 (KK) yang berdasarkan data dari Pemuktakiran Bantuan Data Terpadu (PBDT). Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kelurahan Aie Pacah adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman. Masalah program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang No. 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, mulai dari kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan, dan mekanisme pencairan bantuan yang mana melibatkan

komponen-komponen sumber daya perumahan dan permukiman secara luas dan integratif.

Berkaitan dengan masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian serta pengamatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul penelitian tentang “Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Aie Pacah”. Berkaitan dengan masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian serta pengamatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul penelitian tentang “Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Aie Pacah”. Rumusan masalah yang kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah ?

## METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, di Kelurahan Aie Pacah. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:301), *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Selain itu teknik lain yang dipakai adalah *snowball sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data

primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah

#### Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Aie Pacah

Pelaksanaan program adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci. Masalah pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi tercapainya kehidupan yang sejahtera. Pada kenyataannya untuk mendapatkan rumah yang memenuhi persyaratan bukan hal yang mudah, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan proses pembangunan yang mempunyai implikasi yang kompleks, karena pelaksanaannya berkaitan dengan berbagai pihak pelaku pembangunan yaitu masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator serta pihak-pihak swasta sebagai rekanan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Suparno Sastra, 2006:48). Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah, (taoefiq, 2009:04). Tujuan utama dari pogram bantuan ini adalah dalam

rangka mengurangi masalah kemiskinan yang rasakan sebagian masyarakat dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan indikator menurut Mulyadi (2015:14) dalam teori tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan menyatakan bahwa ada 3 (tiga) yaitu : 1) interpretasi, 2) pengorganisasi, dan 3) implikasi/penerapan.

#### 1. Interpretasi

Dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah, dilihat dari pelaksanaannya dalam program bantuan ini sudah cukup baik, maka dari itu dibutuhkan pemahaman mengenai tujuan ataupun mekanisme dari program yang dilakukan melalui sosialisasi. Kemudian siapa saja orang-orang yang bertanggung-jawab pada program tersebut juga harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program bantuan RTLH ini dapat berjalan dengan lancar apabila kinerja orang-orang yang bertanggung-jawab dalam program tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini akan berdampak positif pada pelaksanaan program tersebut. Untuk itu pemerintah harus bisa mengatur, membina dan membantu masyarakat agar dapat memenuhi sendiri kebutuhan perumahannya dan peran aktif karena ini akan lebih baik bila sejak awal melibatkan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Menurut Mustopadidjaja (2003:37) menyatakan bahwa berhasil atau gagalnya suatu kebijakan tergantung pada beberapa kondisi yaitu : 1. ketetapan pelaksanaan kebijakan, 2. konsistensi dan berkelanjutan

pelaksanaan, 3. Terjadinya perkembangan diluar perkiraan.

## 2. Pengorganisasi

Menurut Van Meter dan Von Horn (dalam Agustino, 2008:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu atau kelompok-kelompok pemerintah yang akan membawa pengaruh untuk diarahkan tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya setiap program yang dijalankan pemerintah, swasta atau masyarakat tentu ada yang mengelola jalannya program tersebut. Keterlibatan instansi-instansi dalam pelaksanaan program bantuan RTLH adalah orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan RTLH di Kelurahan Aie Pacah tetapi tidak semua penerima bantuan merasakan instansi-instansi tersebut membawa pengaruh karena hanya sebagian mereka yang terlibat dan bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dimana didalamnya harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana, serta perlengkapan atau alat-alat kerja untuk penunjang agar program dapat berjalan dengan lancar. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi dampak dalam kegiatan bantuan RTLH adalah birokrasi/organisasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

## 3. Penerapan

Pelaksanaan program bantuan RTLH sudah berjalan dengan cukup baik selama pelaksanaan pembangunan rumah tetapi disisi lain pelaksanaan pembangunan RTLH belum berjalan dengan lancar karena masih terdapat kendala-kendala.

Mulyadi (2015) program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- a. Merancang (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Maka diharapkan adanya peningkatan kualitas program dan perlunya pemerintah daerah untuk dapat menyesuaikan lagi waktu yang diberikan dengan program kerja yang diajalkan, hal ini agar menghasilkan hasil yang optimal. Untuk pengawasan yang sudah berjalan, agar dapat ditingkatkan kembali sehingga hasil dari pengawasan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan secara baik.

## **B. Kendala Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Aie Pacah**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya seluruh kegiatan pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah sudah berjalan dengan cukup baik tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada didalam proses pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie

Pacah. Berdasarkan uraian pembahasan di atas, adapun kendala yang ditemukan dalam implementasi program bantuan RTLH di Kelurahan Aie Pacah yaitu :

*Pertama*, Terbatasnya dana yang diberikan, dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah besar dana yang dikeluarkan juga menentukan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program ini di mulai pada tahun 2016 yang mana bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar 10 juta sampai 15 juta kepada setiap penerimanya. Walaupun bantuan tersebut tidak sepenuhnya bisa membiayai rumah yang akan diperbaiki, namun bantuan tersebut diharapkan menjadi starter bagi masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak huni.

*Kedua*, Kurangnya sumber daya manusia, Dalam pelaksanaan program bantuan RTLH ini sumber daya manusia harus diperhatikan dan juga orang-orang yang melaksanakannya karena hal ini sangat mendukung dan sangat berpengaruh siap atau tidaknya suatu pelaksanaan program bantuan RTLH. Untuk sumber daya manusia yang digunakan dalam program bantuan RTLH adalah petukangnya. Menurut penerima bantuan, petukang yang diberikan hanya untuk lima hari dalam membantu proses rehab rumah, selanjutnya dilakukan oleh penerima bantuan sampai rumah mereka selesai. Untuk biaya upah tukang saja penerima tidak sanggup karena membutuhkan biaya yang cukup besar jadi penerima harus bisa untuk mengakali agar rumah mereka siap dengan cara bergotong royong dengan keluarga terdekat dan masyarakat sekitar.

### **C. Solusi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Aie Pacah**

Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program bantuan RTLH

ini semua pihak terlibat dalam tahapan kegiatan program bantuan RTLH ini dengan mengupayakan setiap kegiatan agar keberhasilan suatu program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah diupayakan ssssecara optimal, pemerintah harus bisa menggerakkan partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan program tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang menjadi pelaksana dalam program bantuan ini tidak mengalami kesulitan serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran dan berperan aktif dalam membantu kegiatan ini. Agar program bantuan terealisasi dengan baik maka melalui sosialisasi pemerintah dapat memberikan pemahaman mengenai tujuan ataupun mekanisme dari program yang dilakukan. Apapun bentuk program kalau tidak disosialisasikan akan sulit bagi masyarakat untuk mengerti. Untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan RTLH, maka dibutuhkan data yang akurat dan bias dipertanggungjawabkan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah masih berjalan cukup baik, karena hasilnya telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam pelaksanaannya sendiri masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa dengan menggunakan indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan bantuan RTLH : (a) dari segi intepretasi yaitu masih ada pelaksana pemahamannya terbatas mengenai

program bantuan RTLH, seperti ketidaktahuan terhadap siapa-siapa saja yang bertanggungjawab dengan program bantuan tersebut. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan RTLH ini, (b) dari segi pengorganisasian yaitu belum sepenuhnya keterlibatan pihak-pihak terkait dengan program bantuan RTLH sehingga dalam hal ini bisa dikatakan kurang keseriusan untuk mengatasi demi keberhasilan program bantuan ini, dan (c) dari segi penerapan yaitu sosialisasi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan RTLH, kemudian kurang transparan dalam memberikan barang kepada penerima bantuan, sehingga jumlah nominal bantuan yang diberikan berupa barang kurang efektif dan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, serta pemahaman dan pengetahuan dari penerima bantuan RTLH yang masih terbatas.

2. Walaupun pelaksanaan bantuan RTLH masih berjalan cukup baik, namun masih terdapat berbagai macam kendala-kendala dalam proses pelaksanaan bantuan RTLH tersebut seperti : terbatasnya dana yang diberikan karena anggaran dana dari pemerintah masih terbatas sehingga dana tersebut tidak mencukupi, kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka penerima bantuan yang melakukan pekerjaan itu sendiri.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah yaitu salah satunya dengan melakukan peningkatan jumlah anggaran penerima bantuan dan sumber daya manusia untuk program bantuan rumah tidak layak huni.

Demi tercapainya pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah yang lebih baik lagi, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan lebih di sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan kegiatan.
2. Pemerintah daerah harus cepat tanggap, berkoordinasi, dengan instansi pemerintah lainnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk para penerima bantuan rumah tidak layak huni dan masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program tersebut agar dapat memahami mengenai tentang tujuan dan target dari program ini.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik karena bimbingan dari Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D dan Ibuk Nora Eka Putri, S.IP, M.Si kemudian kritik dan saran yang diberikan oleh Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, Bapak Afriva Khaidir, SH., M. Hum, MAPA, Ph.D dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si

#### DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik; Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta Santoso, Jonathan. 2002. *Sistem Perumahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Perkotaan UI Dan Ikatan Ahli Perencanaan.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik; Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : Forum Percetakan Negara RI
- Siswono Yudhohusodo dkk. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta : Yayasan Padamu Negeri

- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparno Sastra. 2006. *Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta : ANDI.
- Iwan, Suprijanto. 2004. *Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman*. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 31, No. 2, Desember 2003. Hal 161-170
- Kebijakan Strategi Nasional Perumahan Dan Permukiman (KSNPP). 2002. BKP4N – Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah.
- Peraturan Walikota Padang No. 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Parsons, W. 2008. *Public Policy : Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama
- Rencana Strategi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 Pembangunan Perumahan Dan Permukiman.
- Undang-Undang No. 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman.

## BIOGRAFI PENULIS



### **Nada Kamilia**

Lahir di Padang, 23 Maret 1994. Anak kedua dari Ibu Irawati dan Bapak Edwin, penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Negeri II Padang Pasir Kota

Padang, dilanjutkan SDN 14 TB. Gadang, dilanjutkan SMPN 22 Padang, melanjutkan ke SMK Nusatama Padang, hingga akhirnya menempuh masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.